

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM)**

(Studi pada UMKM di Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Tanti Sulisti

NPM. 1551030090

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM)**

(Studi pada UMKM di Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

Pembimbing II : Any Eliza, S.E., M.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa UMKM mempunyai kedudukan, peran, dan potensi yang strategis maka pemberdayaannya perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Tantangan terbesar bagi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif baik untuk menjalankan organisasi serta untuk kegiatan ekspansi dalam pertimbangan persaingan global. Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, maka pada tahun 2016 DSAK IAI telah mengesahkan suatu standar yang menjadi alternatif yang lebih sederhana atas standar sebelumnya untuk berlaku efektif tahun 2018. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Keharusan melakukan pencatatan atas transaksi keuangan juga tercantum dalam Alquran sebagai landasan hukum tertinggi dalam Islam, yaitu pada Q.S Albaqarah ayat 282.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung terhadap Akuntansi Keuangan dan standarnya, 2) Mengetahui kesiapan pelaku UMKM dalam implementasi SAK EMKM guna perbaikan atas kualitas laporan keuangan suatu usaha, dan 3) Mengetahui kesesuaian SAK EMKM dengan konsep pencatatan dalam Al-quran.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian lapangan. Data yang diperoleh berupa data primer yang didapat melalui wawancara dan penyebaran kuesioner, serta data sekunder dari buku, literatur perpustakaan, dokumentasi, dan jurnal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung tahun 2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Incidental Sampling* dengan menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan 100 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Data yang telah didapat kemudian diolah menggunakan program SPSS v.25 dan Ms. Office Excell dan hasilnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memahami akuntansi dasar, namun kurang memahami SAK EMKM. Ini dikarenakan SAK EMKM itu sendiri masih baru diberlakukan dan sosialisasinya belum menyeluruh. Jika ditinjau dari indikator persepsi dan fasilitas pendukung, pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung cukup siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Konsep atau pola pencatatan standar tersebut juga telah sesuai dengan konsep pencatatan keuangan yang terkandung dalam Alquran.

Kata Kunci : Akuntansi Islam, SAK EMKM, UMKM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tanti Sulisti
NPM : 1551030090
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) Studi pada UMKM di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2019
Penulis,

Tanti Sulisti
NPM. 1551030090



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN
PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (SAK EMKM)
Studi pada UMKM di Kota Bandar Lampung**

Nama : Tanti Sulisti
NPM : 1551030090
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I
NIP. 199707252002121001

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004

Ketua Prodi,

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 19750424002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) Studi Pada UMKM di Kota Bandar Lampung”** disusun oleh, **Tanti Sulisti, NPM: 1551030090**, program studi: **Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu/02 Oktober 2019.**

Waktu : **13.00 – 14.30 WIB.**

Ruangan : **Dekanat FEBI Lantai 2 Ruang Sidang 3.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Nasruddin, M.Ag

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd

Penguji I : Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A

Penguji II : Budimansyah, S.T.H.I., M.Kom.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....."*¹

(QS. Al-Baqarah (2) : 282)



¹ Al-Quran dan Terjemah. *Al-Aliyy*. 2006. Bandung: CV. Diponegoro.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah 'aalamiin sujud syukur ku kepada Allah SWT yang Maha Agung nan Maha Adil, atas takdir-Nya telah menjadikanku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya langkah yang penuh dengan lika-liku telah dilewati dan sampailah ketahap pencapaian yang luar biasa ini. Namun langkah ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan orang-orang yang tersayang.

Lantunan Al-fatihah dan shalawat dalam simpuhku merintih, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira. Ku persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orangtuaku terkasih. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Abah dan Umi yang selalu memberikan segalanya demi mendukung keberhasilanku, kasih sayang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Abah dan Umi bahagia. Untuk do'a yang dipanjatkan setiap sujudmu, untuk nasihat-nasihat yang membuatku lebih terarah, untuk setiap keringat dari perjuanganmu, terimakasih abah, terimakasih umi, semoga Allah juga meridhoi..
2. Saudara-saudaraku yang amat kusayangi, Aa Salasa Moch. Fadila dan Neng Tari Rajabani/Amy yang selalu memberikan dukungan untuk uti, semoga langkah kalian bisa melebihi dari apa yang telah uti capai.

3. Seseorang sebagai penyemangat saat mulai bosan dan lelah, yang secara tidak langsung telah mengubah banyak sudut pandang pemikiranku menjadi lebih baik. Kita telah selangkah lebih dekat, masih banyak lagi target selanjutnya semoga Allah bukakan jalan.
4. Seluruh Keluarga besar Bapak Sarbini dan Ibu Zaenah, serta Keluarga Bapak Supyan dan Ibu Hendariyah yang merupakan kakek dan nenekku.
5. Organisasi yang turut membentuk karakterku menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam banyak hal dan memberi pengalaman-pengalaman tak ternilai.
6. Sahabat-sahabat terdekat ku, Ai Nur Arrafah teman kecil pertamaku yang selalu mendukungku, Sindi Sugiarti yang selalu hadir menyertai sekalipun disaat titik terberatku.
7. Despa Gusria dengan kritik-kritiknya yang membangun. Uun Lestari, Bella Chenia M, Nur Rahma Nike FE, Galuh Nurani AR, Melianah, Era Listika Sari dan Desi Mayanti yang turut mengambil peran dalam keberhasilanku.
8. Teman-teman seperjuanganku, teman-teman organisasi, teman-teman KKN kelompok 91, yang tak bisa disebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tanti Sulisti, lahir di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat pada hari senin tanggal 13 Mei tahun 1997 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Abdul Gani dan Ibu Rina Rostiana. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 1 Sadananya pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Sadananya dan lulus tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis lulus dari SMK Negeri 1 Ciamis dengan program studi Akuntansi, dan pada tahun yang sama penulis diterima di program studi S1 Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan dan organisasi baik didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis juga berkesempatan Magang di KJA Yunus Fiscal & Family selama 4 bulan serta mengajar di LPP Cendikia Bandar Lampung. Penulis pernah meraih Juara 3 Debat Akuntansi dan Perpajakan tingkat mahasiswa se-Provinsi Lampung pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, segala ungkapan rasa syukur dan puji kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKTO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Atas terselesaikannya skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah dan Pembimbing I yang telah memberi arahan dan membimbing penulis.

4. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan ilmu terkait serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kepada seluruh Staff Akademik dan pegawai Perpustakaan yang memberikan pelayanan dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung khususnya Jurusan Akuntansi Syariah.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam *ukhwah islamiyah*.

Akhir kata jika terdapat kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun. Penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Ekonomi Syariah dan Akuntansi Syariah.

Bandar lampung, 08 Agustus 2019

Tanti Sulisti,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	12
G. Signifikansi Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian	13
2. Desain Penelitian	14
3. Prosedur Pengumpulan Data	15
4. Jenis dan Sumber Data	18
5. Definisi Operasional Penelitian	18
6. Populasi dan Sampel	21
7. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	22
8. Pemeriksaan Keabsahan Data	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	26
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	26
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)	28
a. Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM	29

b. Laporan Posisi Keuangan	32
c. Laporan Laba Rugi	33
d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	33
e. Contoh Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM	34
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	39
a. Pengertian UMKM	39
b. Tujuan UMKM	40
c. Kriteria UMKM	41
4. Akuntansi dalam Islam	43
a. Sejarah	43
b. Definisi Akuntansi dalam Islam	46
c. Landasan Syariah	47
d. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Islam	48
B. Penelitian Terdahulu	50
C. Kerangka Berpikir	55
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	57
1. Profil Kota Bandar Lampung	57
a. Sejarah Singkat	57
b. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung	60
c. Tujuan dan Sasaran	66
d. Perkembangan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik	67
2. UMKM di Bandar Lampung	67
B. Deskripsi Data Penelitian	68
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Karakteristik Responden	72
B. Analisis Uji Kualitas Data	74
1. Uji Validitas	74
2. Uji Reliabilitas	76
C. Deskripsi Jawaban Responden	77
D. Pembahasan	84
1. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung Mengenai SAK EMKM	84
2. Kesiapan Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung dalam Implementasi SAK EMKM	86
3. Kesesuaian SAK EMKM dengan Konsep Pencatatan Keuangan dalam Perspektif Islam	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung	5
2. Definisi Operasional Penelitian	19
3. Daftar Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung	60
4. Daftar Usaha Mikro yang diteliti	68
5. Daftar Usaha Kecil yang diteliti	70
6. Daftar Usaha Menengah yang diteliti	71
7. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
8. Distribusi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	72
9. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	73
10. Distribusi Responden Berdasarkan Kriteria Usaha	73
11. Ringkasan Hasil Uji Validitas Kuesioner	75
12. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner	77
13. Klasifikasi Pengelompokan Hasil Riset Berdasarkan Skala Likert ..	79
14. Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pemahaman Akuntansi Dasar .	79
15. Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pemahaman SAK-EMKM	80
16. Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesiapan Implementasi SAK- EMKM	81
17. Klasifikasi Hasil Riset	82
18. Rincian Klasifikasi Hasil Riset Berdasarkan Kriteria Usaha	83
19. Rincian Klasifikasi Hasil Riset Berdasarkan Jenis Usaha	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Laporan Keuangan Entitas	31
2. Laporan Posisi Keuangan	32
3. Laporan Laba Rugi Entitas	33
4. Catatan Atas Laporan Keuangan	34



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung
2. Kuesioner Penelitian
3. Karakteristik Responden
4. Pedoman Wawancara dengan Pelaku UMKM
5. Distribusi Nilai r_{tabel}
6. Rekapitulasi Jawaban Responden
7. Hasil Uji Statistik
8. Kartu Konsultasi Skripsi
9. Surat Izin Riset dari Kantor KESBANGPOL Kota Bandar Lampung
10. Berita Acara Sidang Munaqasyah
11. Dokumentasi saat Penyebaran Kuesioner



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dari suatu karya ilmiah merupakan inti dari suatu masalah yang akan dibahas, dikaji, dan diuraikan secara sistematis. Dalam hal ini penulis menetapkan judul: **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM)”**. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu adanya penegasan judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Paham menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu pandangan atau pandai dan mengerti dengan benar, sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan dalam memahami suatu hal. Maka Tingkat Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang dapat memahami arti suatu konsep, serta fakta yang ada.²

¹Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 60.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 811.

3. Kesiapan merupakan suatu keadaan seseorang yang akan membuatnya mampu menghadapi perubahan yang terjadi.³
4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.⁴
5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang dari usaha yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha besar, dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.⁵
6. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁶
7. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah suatu Standar Akuntansi Keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dari SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.⁷

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dari judul tersebut adalah suatu penelitian ilmiah terkait tingkat pemahaman dan kesiapan para pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK

³Evi Puji Lestari, “Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno”, *Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 (Mei 2018), h. 50.

⁴*Ibid.*, h. 827.

⁵Wikipedia. “Usaha Kecil Menengah”. (On-line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/Usaha_Kecil_dan_Menengah (6 februari 2019).

⁶“Arti kata implementasi” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/implementasi> (18 Mei 2019).

⁷“Standar Akuntansi Keuangan” (On-line), tersedia di: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/emkm> (6 Mei 2019).

EMKM, yakni suatu standar keuangan yang dikhususkan untuk diterapkan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

B. Alasan Memilih Judul

Setiap penelitian tentu ada alasan yang dijadikan acuan dalam memilih judul penelitian. Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Di kota Bandar Lampung banyak bermunculan usaha yang tergolong mikro, kecil, dan menengah yang menjadi sasaran untuk penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan yang dihasilkannya. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya, Maka perlu adanya penelitian untuk menggali sejauh mana pemahaman pelaku UMKM mengenai SAK EMKM dan kesiapan implementasinya sehingga dapat dilihat seberapa besar prospek terkait perbaikan kualitas laporan keuangan demi kelangsungan usaha.

2. Alasan Subjektif

- a. Menurut penulis, kajian tentang pemahaman dan kesiapan implementasi SAK EMKM sangat tepat dan relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Jurusan Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi Syariah.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai referensi.

- c. Penulis ingin menyesuaikan fenomena yang terjadi dengan syariat islam.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Peranan UMKM sangat strategis dalam perekonomian sebagai salah satu kekuatan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi nasional.⁸ Karena itu, pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu kelebihan UMKM adalah mampu bertahan dalam menghadapi kondisi krisis. Di Indonesia, UMKM telah terbukti mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008.⁹ Keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang

⁸I.C. Kusuma, V. Lutfiany, "Persepsi UMKM dalam Memahami SAK EMKM". *Jurnal AKUNIDA*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2018), h. 2.

⁹Dewi Novita Sitorus, "Analisis Determinan Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM mengenai SAK ETAP serta Pengaruhnya terhadap Kemudahan Akses ke Lembaga Keuangan". *Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia*, Vol.8 No.1,(Mei 2016), h. 87.

signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah tersebut. Kontribusi yang diberikan oleh pelaku UMKM pada kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemulihan perekonomian nasional, dipandang dari laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam peningkatan jumlah lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional.¹⁰

Di Kota Bandar Lampung telah banyak berkembang UMKM yang tersebar di setiap Kecamatan, berikut adalah data jumlah UMKM yang ada di Bandar Lampung :

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1.	Tanjung Karang Pusat	1.760	890	342	2.992
2.	Tanjung Karang Timur	1.199	709	245	2.153
3.	Tanjung Karang Barat	994	776	238	2.008
4.	Kedaton	1.172	836	309	2.317
5.	Rajabasa	1.369	714	270	2.358
6.	Tanjung Senang	1.186	784	325	2.295
7.	Sukarame	1.418	912	267	2.597
8.	Sukabumi	1.180	672	315	2.167
9.	Panjang	1.191	917	268	2.376
10.	Teluk Betung Selatan	1.309	795	236	2.340
11.	Teluk Betung Barat	1.316	653	220	2.189
12.	Teluk Betung Utara	1.166	635	291	2.092
13.	Teluk Betung Timur	1.098	788	301	2.187
14.	Kemiling	1.670	846	232	2.746
15.	Enggal	1.249	942	237	2.428
16.	Bumi Waras	1.224	678	270	2.172
17.	Way Halim	1.162	682	266	2.110

¹⁰Barkah Susanto, Nur Laila Yuliani, "Prospek Implementasi SAK ETAP Berbasis Kualitas Laporan Keuangan UMKM". Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012. h. 3.

18.	Kedamaian	1.209	729	284	2.222
19.	Labuhan Ratu	1.351	828	257	2.436
20.	Langkapura	1.162	719	261	2.142
Jumlah		25.385	15.505	5.434	46.324

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, 2018.

Menurut data dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Lampung pada triwulan I 2019 mengalami penurunan sebesar 0,2% dibandingkan triwulan IV 2018.¹¹ Selain itu, perkembangan UMKM yang semakin pesat juga tidak diimbangi dengan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan usaha lainnya. Perkembangan UMKM yang pesat berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat. Kompetisi yang semakin ketat cenderung memposisikan UMKM pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak mampu berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha. Tantangan terbesar bagi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif baik untuk menjalankan organisasi serta untuk kegiatan ekspansi dalam pertimbangan persaingan global.

Disamping itu, dalam menjalankan aktivitas usaha seringkali pelaku UMKM menghadapi permasalahan yang membuat UMKM sulit berkembang. Terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Pertama, permasalahan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan karena pelaku UMKM masih merasa kesulitan akibat kurangnya pemahaman terkait pembukuan dan akuntansi serta standar yang berlaku.¹² Kedua, permasalahan yang terkait dengan permodalan, akibat dari kurangnya kepercayaan dari lembaga

¹¹ “Kajian Ekonomi Regional” (On-line), tersedia di : <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/lampung/pages/KEKR-Provinsi-Lampung-Periode-Mei-2019.aspx> (24 Juni 2019).

¹² Arri Alfitri, Ngadiman, Sohidin, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten”. *Universitas Sebelas Maret, Jupe UNS*. Vol. 2 No. 2, (2014), h. 143.

keuangan bank maupun non-bank terhadap kemampuan pengembalian kredit yang dilihat dari informasi keuangan yang dianggap kurang reliabilitas sehingga menghambat aksesibilitas kredit.¹³ Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi yang semakin maju, dan keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa dalam UMKM.¹⁴

Adanya ketidaksiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan standar keuangan yang berlaku sehingga penerapannya banyak yang tidak sesuai. Standar pencatatan keuangan juga masih dianggap memberatkan, hal ini dikarenakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya.¹⁵

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, penghitungan pajak, kinerja dan arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun seperti yang dijabarkan di empat permasalahan pada paragraf sebelumnya, praktek akuntansi keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Keharusan untuk

¹³Rizki Rudiantoro, Sylvia Veronica Siregar, "Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 No. 1, (Juni 2012), h. 2.

¹⁴Sri Ernawati, Jumirin Asyikin, Octavia Sari, "Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di kota Banjarmasin". *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, Vol. 6 No. 2, (September 2016), h. 81.

¹⁵Pratiwi Sariningtyas, Tituk Diah W, "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil dan Menengah". *JAKI*, Vol. 1 No.1, (2011), h. 91.

mencatat transaksi atau praktek akuntansi juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar keharusan atas pencatatan transaksi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

QS. Al-Baqarah (2): Ayat 282 merupakan ayat yang secara jelas berisi perintah pencatatan transaksi ekonomi. Dalam ayat tersebut terdapat 8 kata berakar dari kata ‘mencatat’, sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. Ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam mencatat transaksi sesuai dengan porsinya. Sifat adil/keadilan merupakan asas dalam akuntansi syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedang kebalikannya adalah kedzaliman.

Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 yang selanjutnya disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. SAK EMKM memiliki tujuan untuk standarisasi laporan keuangan UMKM dan menjawab fenomena bahwa tidak semua UMKM dapat melaksanakan

¹⁶ Al-Quran dan Terjemah. Al-Aliyy. 2006. Bandung: CV. Diponegoro.

implementasi Standar sebelumnya yang di anggap menyulitkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Karena harapan dari penerbitan SAK EMKM ini adalah untuk membantu dalam pengembangan UMKM di Indonesia, maka seharusnya SAK EMKM ini diimplementasikan secara optimal. Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mengetahui adanya SAK EMKM ini sehingga belum dilaksanakan dengan optimal. Salah satunya yaitu di Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam hal menggali kembali tingkat pemahaman dan sejauhmana kesiapan para pelaku UMKM yang menjadi dasar untuk menilai bagaimana prospek dari implementasi SAK ETAP terkait perbaikan kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh pengusaha UMKM. Apakah dengan teknik analisa berbeda serta menyesuaikan pada syariat islam akan menghasilkan simpulan yang berbeda atau sebaliknya, sehingga akan menambah literatur penelitian dan menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan.

D. Fokus Penelitian

Melalui telaah atau penilaian tingkat pemahaman (dengan menggunakan indikator: pengetahuan terhadap akuntansi dasar dan SAK EMKM) dan kesiapan pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung terhadap implementasi SAK EMKM, dapat diketahui prospek dari pengimplementasian SAK EMKM dan apakah pembentukan dan pengesahan SAK EMKM ini dapat benar-benar mencapai tujuan utamanya yaitu penyelenggaraan sistem akuntansi yang lebih baik namun sederhana bagi entitas mikro, kecil dan menengah serta dapat diketahui juga kesesuaiannya dengan konsep pencatatan transaksi keuangan dalam Alquran.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, didapat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung mengenai SAK EMKM?
2. Apakah pelaku UMKM tersebut telah siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan?
3. Bagaimana kesesuaian SAK EMKM dengan konsep pencatatan keuangan dalam perspektif Islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung terkait standar penyusunan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui kesiapan pelaku UMKM tersebut dalam mengimplementasikan SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara SAK EMKM dengan konsep pencatatan keuangan dalam perspektif Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai kaitannya dengan judul yang diteliti dan dapat memberi dampak sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Akuntansi Syariah khususnya dalam hal pembukuan atau implementasi SAK EMKM serta kesesuaiannya dengan syariat Islam.

2. Praktis

- a. Penelitian ini menggambarkan keadaan riil tentang UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, khususnya pada pemahaman dan kesiapan implementasi SAK EMKM dalam hal perbaikan kualitas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan meningkatnya prospek usaha sehingga terjaminnya keberlangsungan

usaha, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi.

- b. Dapat mengetahui kemampuan dan keterbatasan para pelaku UMKM tersebut untuk menyusun laporan keuangannya secara berkala dan terus menerus sesuai dengan standar.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DSAK IAI untuk dapat menilai langkah sosialisasi apa yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesiapan para pelaku UMKM tersebut.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Maka dari itu penelitian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran data di lapangan mengenai tingkat pemahaman pelaku UMKM dan kesiapannya dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: AFABETA, 2017), h. 2.

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸

Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen, website, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan SAK EMKM.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹ Desain penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai

¹⁸*Ibid.*, h. 9.

¹⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009) h. 54.

situasi atau kejadian, yang akan disajikan dalam bentuk narasi. Secara umum, metode deskriptif diberi nama metode survei.²⁰

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian.²¹ Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Peneliti menggunakan teknik observasi karena berkenaan dengan pemahaman dan perilaku manusia, serta proses kerja.²²

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada UMKM di Kota Bandar Lampung dan fenomena sosial yang berkaitan dengan pengelolaan UMKM itu sendiri, terutama pengelolaan keuangannya. Pada saat observasi juga peneliti menentukan fokus penelitian pada hal yang dianggap krusial di lingkungan sosial usaha-usaha yang tergolong mikro, kecil, dan menengah, serta mengumpulkan data-data awal untuk menunjang penelitian.

²⁰*Ibid.*, h. 55.

²¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 93.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*...., h. 145.

b. Wawancara (interview)

Wawancara atau *interview* merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden.²³ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.²⁴

Wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM bersama Bapak Ahmad Mirza, S.Sos. selaku Kasubbag Umum sebagai narasumbernya, melalui wawancara ini didapat data berupa jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung yang tersebar di 20 Kecamatan. Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan para pelaku usaha yang menjadi objek penelitian ini guna meyakinkan kembali jawaban-jawaban yang diberikan responden pada kuesioner.

c. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai dengan persepsinya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti

²³ Moh. Nazir, *Metode.....*, h. 194.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 194.

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu juga kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.²⁵

Peneliti mengadopsi kuesioner dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Pemahaman dan Kesiapan UKM dalam Implementasi SAK ETAP” oleh Ari Dewi Cahyati, et al. di Bekasi. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian yang sering menggunakan skala ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif (gambaran). Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia.

d. Dokumentasi

Dokumentasi lebih mengarah pada bukti konkret berupa sumber tertulis, gambar (foto), bahan statistik, dan sebagainya yang mengandung informasi berkaitan dengan penelitian. Dengan

²⁵ *Ibid.*, h. 142.

instrumen ini peneliti dapat menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.²⁶

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menggunakan kuesioner dan wawancara. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang telah dirancang untuk penelitian sejenis dan kemudian peneliti modifikasi sesuai dengan konteks penelitian ini. Dalam hal ini, kuesioner yang dimodifikasi seperti pada indikator tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam implementasi SAK EMKM, dibeberapa item yang masih mengacu pada penelitian sebelumnya tentang SAK ETAP disesuaikan dengan konteks penelitian ini yaitu SAK EMKM. Kemudian kuesioner tersebut diolah sendiri untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sedangkan wawancara dilakukan untuk meyakinkan penulis atas jawaban responden pada kuesioner.

5. Definisi Operasional Penelitian

Hal yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini tertuang pada 2 variabel, yang pertama yaitu pemahaman pelaku UMKM mengenai SAK

²⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian....*, h. 95.

EMKM, dimana variabel ini berkaitan dengan Pemahaman penguasaan Sumber Daya Manusianya terhadap ilmu Akuntansi dan SAK EMKM, sedangkan variabel yang kedua yaitu kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, yang berkaitan dengan faktor pendukung seperti insfrastruktur, dan presepsi dari pengguna, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item
1.	Pemahaman pelaku UMKM mengenai SAK EMKM	a. Akuntansi Dasar ²⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Ilmu Akuntansi. 2. Transaksi akuntansi digolongkan berdasarkan kelompok dan jenisnya. 3. Dalam akuntansi terdapat 5 kelompok /jenis transaksi. 4. Adanya pencatatan- pencatatan transaksi secara kronologis dan sistematis dalam akuntansi. 5. Bentuk laporan keuangan. 6. Tujuan Akuntansi secara sederhana. 7. Hasil dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. 8. Pengertian Laporan keuangan secara sederhana. 9. Laporan keuangan adalah alat akuntansi. 10. Manfaat laporan keuangan untuk keperluan internal perusahaan. 11. Manfaat menerapkan ilmu akuntansi. 12. Manfaat laporan keuangan untuk keperluan dengan pihak eksternal perusahaan.

²⁷ S. Patricia Febrina Dwijayanti, Rias Tuti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP", h. 153.

		<p>b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM)²⁸</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar yang mengatur proses akuntansi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2. Adanya aturan baku yang mengatur pembukuan UMKM yang bernama SAK-EMKM yang berlaku efektif 1 Januari 2018. 3. Entitas yang disyaratkan terapkan SAK EMKM sebagai dasar pelaporan. 4. Hal yang diatur oleh standar. 5. Perbedaan antara SAK- ETAP dan SAK-EMKM. 6. Yang diatur oleh SAK EMKM adalah UMKM yang masuk pada kriteria yang diatur dalam UU No 20 tahun 2008. 7. Dasar pengukuran untuk SAK-EMKM. 8. Komponen laporan keuangan dalam SAK EMKM.
2.	<p>Kesiapan pelaku UMKM dalam implementasi SAK- EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.</p>	<p>Presepsi²⁹ dan fasilitas pendukung³⁰</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya Standar Akuntansi. 2. Pencatatan transaksi. 3. Menyimpan bukti transaksi. 4. Kontrol terhadap jalannya usaha. 5. Pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. 6. Membutuhkan seseorang yang ahli dalam akuntansi. 7. Akan melakukan pencatatan berdasarkan SAK EMKM.

²⁸ Sri Ernawati, Jumirin Asyikin, Octavia Sari, "Penerapan Sistem Akuntansi Dasar....", h. 90.

²⁹ I Made Narsa, Agus Widodo, dan Sigit Kurnianto, "Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan". *Majalah Ekonomi Tahun XXII*, No. 3 (Desember 2012), h. 77.

³⁰ Ari Dewi Cahyati, Kurniawati Mulyanti, Rianti Setyawasih, "Pemahaman dan Kesiapan UKM dalam Implementasi SAK ETAP : Survey pada UMKM di Bekasi", *JRAK*, h. 12.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³² Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi maka diambil beberapa sampel. Dalam menetapkan besarnya sampel (*sample size*) pada penelitian ini didasarkan pada penghitungan menggunakan metode Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = Besaran sampel

N = Besaran populasi

e = persentase kelonggaran ketidak telitian karena pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 10%

Menurut data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung tercatat sebanyak 46.324 UMKM yang tersebar di

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 80.

³²*Ibid.*, h. 81.

Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2018. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian adalah :

$$n = \frac{46.324}{1 + 46.324 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{46.324}{1 + 463,24}$$

$$n = 99,7845$$

Berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui, ukuran sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 99,7845 pelaku UMKM atau jika dibulatkan menjadi 100 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Incidental Sampling*. *Incidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.³³

7. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui

³³ *Ibid.*, h. 85.

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Berikut ini adalah prosedur analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.³⁴

b. Triangulasi

Teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*....., h. 247.

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.³⁵

8. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas/keabsahan terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan program SPSS v.25 melalui:

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Product Moment* yaitu dengan cara

³⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 330.

mengkorelasikan masing-masing skor butir pernyataan dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang over estimasi. Pengujian menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah : ³⁶

- 1) Jika signifikansi $<0,05$ maka item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika signifikansi $>0,05$ maka item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,6.³⁷

³⁶ Riduwan, "Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 89

³⁷ *Ibid.*, h. 103.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka kerja konseptual mirip dengan konstitusi, yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan praktek yang sudah diterima secara umum, karena kegunaan dan kelogisannya standar ini disebut standar akuntansi.

Menurut Suwardjono, Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metoda, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.³⁸

³⁸Suwardjono. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. (Yogyakarta: BPFE, 2008), h.

Menurut Riahi-Belkaoui, ada empat alasan mengapa standar akuntansi dibuat, yaitu:³⁹

- a. Standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan.
- b. Standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam “menjual” keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut.
- c. Standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi dan sasaran-sasaran sosial lainnya.
- d. Standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi.

Mengingat pentingnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka mekanisme penyusunannya harus sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. Sehingga Standar

³⁹ A. Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 34.

Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima secara umum. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi menjelaskan transaksi yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang disajikan.

Di Indonesia, badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi yang berada dibawah Ikatan Standar Akuntansi (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan. IAI telah menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang dijadikan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan pada tahun 2016 untuk entitas tanpa akuntabilitas publik sebagai mana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya dalam 2 tahun. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- (a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan

- (b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pengusaha yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.⁴⁰

Sedangkan entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan, jika:

- (a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- (b) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria di atas, hanya jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

a. Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Menurut SAK EMKM, laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna

⁴⁰ Marry Setiady, "Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen Di Pusat Grosir Surabaya". (2011). h. 79.

dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.⁴¹

Pos-pos yang akan muncul dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Berikut ini merupakan penjelasan pengakuan masing-masing pos dalam laporan keuangan SAK EMKM:

- (1) Aset. Aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
- (2) Liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi

⁴¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), h. 3.

dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

- (3) Penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- (4) Beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.⁴²

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan minimum, meliputi :

- (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (2) Laporan laba rugi selama periode;
- (3) Catatan atas laporan keuangan, yang bersisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Laporan keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan :

- (1) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan,

⁴² *Ibid.*, h. 6.

- (2) Tanggal akhir periode pelaporan dan menyajikan laporan keuangan,
- (3) Rupiah sebagai mata uang penyajian, dan
- (4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.⁴³

b. Laporan Posisi Keuangan

Menurut SAK EMKM, Laporan Posisi Keuangan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- (1) Kas
- (2) Piutang
- (3) Persediaan
- (4) Aset Tetap
- (5) Utang Usaha
- (6) Utang Bank
- (7) Ekuitas

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

⁴³ *Ibid.*, h. 8.

c. Laporan Laba Rugi

Dalam SAK EMKM (2016), laporan laba rugi mencakup pos-pos sebagai berikut :

- (1) Pendapatan
- (2) Beban Keuangan
- (3) Beban Pajak

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan hal lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan memuat :⁴⁴

- (1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- (2) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- (3) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga

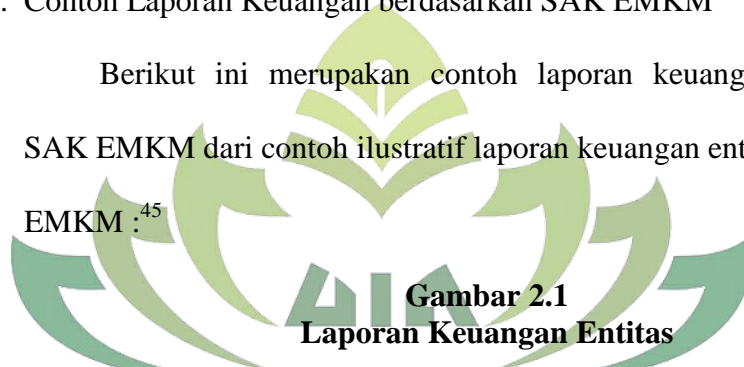
⁴⁴ *Ibid.*, h. 13.

bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Contoh Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Berikut ini merupakan contoh laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dari contoh ilustratif laporan keuangan entitas dalam SAK EMKM :⁴⁵



**ENTITAS XXX
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20XX**

DAFTAR ISI

LAPORAN POSISI KEUANGAN	1
LAPORAN LABA RUGI	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3

Sumber: SAK EMKM, 2016: Contoh Ilustratif Laporan Keuangan Entitas

⁴⁵ *Ibid.*, h. 47.

Gambar 2.2
Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS XXX LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20XX			
	Catatan	20x8	20x7
ASET			
Kas dan Setara Kas	3	xxx	xxx
Piutang Usaha	4	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	5	xxx	xxx
Aset Tetap		xxx	xxx
<i>Akumulasi Penyusutan</i>		(xxx)	(xxx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank	6	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo Laba (defisit)	7	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM, 2016: Contoh Ilustratif Laporan Keuangan Entitas

Gambar 2.3
Laporan Laba Rugi Entitas

ENTITAS XXX LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 20XX			
	Catatan	20x8	20x7
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha	8	xxx	xxx
Pendapatan Lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban Usaha		xxx	xxx
Beban Lain-lain	9	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban Pajak Penghasilan	10	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM, 2016: Contoh Ilustratif Laporan Keuangan Entitas

Gambar 2.4
Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS XXX CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20XX	
1. UMUM	<p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xx, Jakarta Utara.</p>
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	<p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang Usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead variable</i> dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p>

f. Pengakuan Pendapatab dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS DAN SETARA KAS

	20x8	20x7
a. Kas kecil di Jakarta – Rupiah	xxx	xxx
b. Giro PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
c. Deposito :		
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga – Rupiah	4,5 %	5,0 %

4. PIUTANG USAHA

	20x8	20x7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

5. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	20x8	20x7
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan Perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

6. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20X8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

7. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

8. PENDAPATAN PENJUALAN

	20x8	20x7
Penjualan	xxx	xxx
(Retur Penjualan)	(xxx)	(xxx)
Jumlah	xxx	xxx

9. BEBAN LAIN-LAIN		
	20x8	20x7
Bunga Pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
10. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	20x8	20x7
Pajak Penghasilan	xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM, 2016: Contoh Ilustratif Laporan Keuangan Entitas

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik yang pada dasarnya membutuhkan sebuah laporan keuangan untuk dapat mengembangkan usahanya.⁴⁶ Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 definisi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:⁴⁷

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

⁴⁶S. Patricia Febrina Dwijayanti, Rias Tuti, "Faktor-Faktor Yang.....", h. 160.

⁴⁷ Ibrahiem Moussa, "Pencatatan Keuangan Menurut Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Surabaya", Artikel Ilmiah, (2017), h.3.

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Tujuan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM memiliki asas-asas yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional.⁴⁸

⁴⁸ Yayuk Sulistyowati, "Pencatatan Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di Kota Malang)". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol.5 No.2 (Desember 2017), h. 51.

c. Kriteria UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprises* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Aset atau Modalnya
 - a) Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b) Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c) Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2) Berdasarkan Omzetnya

- a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
- b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁴⁹

Klasifikasi lainnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam websitenya menyebutkan bahwa industri mikro adalah usaha yang

⁴⁹Nisa Noor Wahid, "Pengaruh Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Dan Motivasi Terhadap Kinerja UKM di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12 No. 1 (2017). h. 55.

memiliki tenaga kerja sebanyak 1-4 orang, industri kecil adalah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang, sedangkan industri menengah adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 20-99 orang.

4. Akuntansi dalam Islam

a. Sejarah Akuntansi dalam Islam dan Praktiknya⁵⁰

Pada masa penyebaran Islam, peradaban manusia didominasi oleh Bangsa Persia dan bangsa Romawi. Sebagian besar daerah di Timur Tengah berada dalam jajahan Romawi dan menggunakan bahasa negara jajahan seperti Sham (meliputi Siria, Lebanon, Jordania, Palestina), sedang Iraq dijajah oleh Persia. Perdagangan bangsa Arab Mekkah terbatas ke Yaman pada musim dingin dan ke Sham pada musim panas.

Penyebaran Islam menyebabkan penggunaan angka arab (adanya angka nol) meluas ke berbagai wilayah di dunia. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai (Q.S Albaqarah : 282) mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan transaksi di kalangan umat. Hal ini mendorong berkembangnya kerjasama (*partnership*). Begitupun kewajiban membayar zakat telah mendorong pemerintah islam membuat laporan keuangan periodik Baitul Maal, di samping juga mendorong pedagang Muslim mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat

⁵⁰ Ali Mauludi AC, "AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif", *Iqtishadia*, Vol. I No. 1 (Juni 2014), h. 70.

dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nishab dan haul. Maka dalam hal ini, peran seorang akuntan sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan kekayaan pemerintah dan pedagang.

Pada zaman Rasulullah SAW, cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran & tugas tersendiri. Perkembangan pemerintah Islam hingga Timur-Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Umar bin Khatab, telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Akhirnya, Umar bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama *Ad-Diwan* (*dawwana* = tulisan).

Reliabilitas laporan keuangan pemerintahan semakin berkembang ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (681-720 M) dengan adanya kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Kemudian pada masa Al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M) diperkenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi ketika pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku/*auditing*.

Sistem pembukuannya menggunakan model buku besar, meliputi:⁵¹

- 1) *Jaridah Al-Kharaj* (menyerupai *receivable subsidiary ledger*), menunjukkan hutang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hutang hewan ternak dan cicilan. Utang individu dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain.
- 2) *Jaridah Al-Nafaqat* (jurnal pengeluaran).
- 3) *Jaridah Al-Mal* (jurnal dana), mencatat penerimaan dan pengeluaran dan zakat.
- 4) *Jaridah Al-Musadarin*, mencatat penerimaan denda/ sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi.

Laporan akuntansi yang berupa *al-Khitmah*, menunjukkan tentang total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan (Bin Jafar, 1981). Dan *al-Khitmah al-Jami'ah* adalah laporan keuangan komprehensif gabungan antara *income statement* dan *balance sheet* (pendapatan, pengeluaran, surplus/defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap), dilaporkan di akhir tahun. Sedangkan dalam perhitungan dan penerimaan zakat, hutang zakat, hutang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan dalam 3 kategori yaitu *collectable*, *doubleful debts* dan *uncollectable debts*.

⁵¹ *Ibid.*, h. 71.

b. Definisi Akuntansi dalam Islam

Akuntansi dalam bahasa arabnya adalah *Al-Muhasabah* berasal dari kata masdar *hassaba-yuhasbu* yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, *al-Muhasabah* memiliki berbagai asal kata yaitu *ahsaba* yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal dari kata *Ihtiasaba* yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkannya”.

Jika kata *muhasabah* dikaitkan dengan *ihtisab* dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (*mizan*) sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Selain itu, jika kita cermati surat al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuatkan oleh seseorang. Jadi, Akuntansi adalah proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai olahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.⁵²

⁵² *Ibid.*, h. 60.

c. Landasan Syariah

Al-Quran menitik beratkan akuntansi pada surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (*kitabah*), dasar dan manfaatnya. Sedangkan dari ayat-ayat lain yang juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam al-Quran adalah:⁵³

- 1) Asy-Syu'ara ayat 181-184, mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik, perintah jangan merugikan manusia pada hak-haknya dan bertakwa kepada Allah.



Artinya : “Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (181) Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, (182) Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, (183) kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (184).”⁵⁴

- 2) Al-Hujaraat ayat 6, yang menerangkan proses *auditing* (*tabayyun*) dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya kepada orang lain.

⁵³ M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 97.

⁵⁴ Al-Quran dan Terjemah. Al-Aliyy. 2006. Bandung: CV. Diponegoro.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*⁵⁵

- 3) Al-Israa’ ayat 35, yang menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang ada dalam setiap unsur laporan keuangan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁵⁶

d. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Islam

Berikut adalah ciri-ciri pelaporan keuangan dalam bingkai syariah:⁵⁷

- 1) Dilaporkan secara benar;
- 2) Cepat laporannya;
- 3) Dibuat oleh ahlinya (akuntan);
- 4) Terang, jelas, tegas dan informatif;
- 5) Memuat informasi yang menyeluruh;

⁵⁵ Al-Quran dan Terjemah. Al-Aliyy. 2006. Bandung: CV. Diponegoro.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ali Mauludi, *Tekhnik Memeahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim’s Publishing, 2014), h. 6.

- 6) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal;
- 7) Terperinci dan teliti;
- 8) Tidak terjadi manipulasi;
- 9) Dilakukan secara terus-menerus (tidak lalai);

Namun, secara umum prinsip Akuntansi Syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat al-Baqarah, ayat 282, yaitu:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2) Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak

diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Dewi Cahyati, Kurniawati Mulyanti, dan Rianti Setyawasih yang berjudul “Pemahaman dan Kesiapan UKM dalam Implementasi SAK ETAP: Survey pada UKM di Bekasi” yang menggunakan metode deskriptif – kuantitatif dengan teknik *judgement sampling* dan sebar kuisioner. Hasil penelitiannya mengungkapkan Sebagian besar UKM di wilayah Bekasi yang diteliti sudah membuat laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak dan pembuatan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha serta pengajuan kredit ke lembaga keuangan. Sebagian besar UKM yang ada di daerah Bekasi hanya sebatas mendekati cukup paham perlakuan akuntansi untuk Entitas yang menggunakan SAK ETAP, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi. Disamping itu banyak responden yang berencana, siap dan mau melaksanakan implementasi SAK ETAP.⁵⁸

⁵⁸ Ari Dewi Cahyati, Kurniawati Mulyanti, Rianti Setyawasih, “Pemahaman dan Kesiapan.....

2. Penelitian oleh I Made Narsa, Agus Widodo dan Sigit Kurnianto berjudul “Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan” menggunakan metode kualitatif dengan teknik interview. Penelitian ini mengemukakan bahwa Tidak ada catatan sama sekali berapa uang yang dipakai sebagai modal, untuk operasional, dan lain-lain. Bahkan pencatatan transaksi akan dibuang manakala di rasa proses transaksi sudah selesai. Bahkan pengelolaan keuangan sama sekali tidak diperhatikan meskipun telah mempunyai akte pendirian CV. Ada juga UMKM yang mempunyai catatan transaksi harian dengan tertib, namun hanya berhenti pada pencatatan transaksi operasional saja. Sehingga apa yang menurutnya menjadi laporan keuangan adalah rekapitulasi debit dan kredit saja.⁵⁹
3. Penelitian oleh Arri Alfitri, Ngadiman dan Sohidin, dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten”, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menemukan bahwa Masih rendahnya pemahaman Perajin mebel di UMKM Desa Gondangsari tentang pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada

⁵⁹I Made Narsa, Agus Widodo Dan Sigit Kurnianto, “Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan”. *Majalah Ekonomi Tahun XXII*, No. 3 (Desember 2012).

SAK-ETAP serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikannya. Pencatatan keuangan yang dilakukan hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan, tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena kurang memahaminya. Kendala-kendala dalam menerapkan SAK-ETAP diantaranya kurangnya pengetahuan, belum adanya tenaga akuntansi yang profesional, kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dan kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten.⁶⁰

4. Penelitian oleh Dewi Novita Sitorus yang berjudul “Analisis Determinan Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM mengenai SAK ETAP serta Pengaruhnya terhadap Kemudahan Akses ke Lembaga Keuangan”, menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sebar kuesioner. Peneliti mengemukakan bahwa Tingkat pengetahuan pelaku UMKM mengenai SAK ETAP akan berbeda apabila latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan dan usia yang dimiliki berbeda.⁶¹
5. Penelitian oleh Deddy Kurniawansyah yang berjudul “Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”, dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

⁶⁰Arri Alfitri, Ngadiman, Sohidin, “Penerapan Standar Akuntansi.....

⁶¹Dewi Novita Sitorus, “Analisis Determinan Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM mengenai SAK ETAP serta Pengaruhnya terhadap Kemudahan Akses ke Lembaga Keuangan”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.8 No.1 (Mei 2016).

permasalahan yang sering dihadapi terkait beberapa bidang yaitu bidang SDM dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah, motivasi rendah, penguasaan teknologi yang rendah, dan bidang Keuangan, berkaitan dengan sulitnya mencari tambahan modal dan juga keterbatasan dalam administrasi pembukuan atau keuangan. Pelaksanaan pembukuan akuntansi merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting.⁶²

6. Penelitian oleh Teti Rahmawati dan Oktaviani Rita Puspasari yang berjudul “Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan”, Menghasilkan temuan bahwa UMKM di Kabupaten Kuningan belum siap untuk menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena sebagian besar pelaku usaha belum memahami. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menunjukkan adanya kemungkinan bahwa laporan keuangan UKM belum dapat menjadi sumber informasi yang andal dan relevan bagi perbankan.⁶³
7. Penelitian oleh Marry Setiady yang berjudul “Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen Di Pusat Grosir Surabaya”. Dari penelitiannya dapat diketahui Sebagian besar UKM yang siap mengimplementasikan SAK ETAP adalah

⁶² Deddy Kurniawansyah, “Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”. *Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, ISBN 978-602-60569-2-4 (Desember 2016).

⁶³ Teti Rahmawati, Oktaviani Rita Puspasari, “Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan”. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 (2017).

perusahaan yang telah memiliki sistem akuntansi yang cukup rapi dan tertata, sedangkan yang tidak siap umumnya pencatatan dan pembuatan laporan keuangannya tidak pernah dilakukan dengan alasan bahwa akuntansi itu sulit dan rumit serta tidak tersedianya cukup waktu dan SDM yang memadai untuk melakukan pencatatan akuntansi dan membuat laporan keuangan.⁶⁴

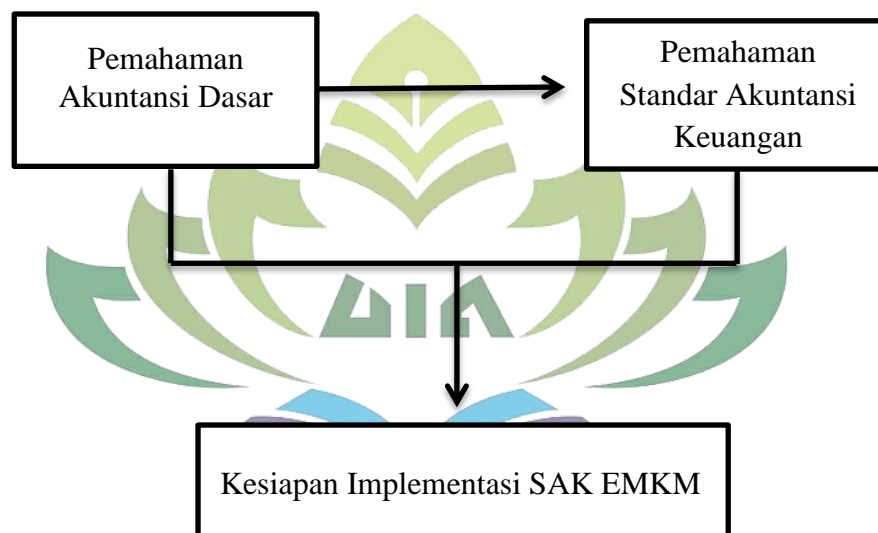
8. Penelitian yang berjudul “Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno” oleh Evi Puji Lestari, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam pada 3 UD yang tergolong dalam usaha mikro menghasilkan temuan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pembukuan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait SAK. Pelaku usaha juga mengaku tidak siap untuk mengimplementasikannya.⁶⁵
9. Penelitian oleh Hetika dan Nurul Mahmudah yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Enititas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Menyusun Laporan Keuangan” merupakan penelitian lapangan lanjutan pada UMKM di kota Tegal dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini ditemukan kendala yang selama ini dihadapi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Umumnya pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana untuk mencatat keuangan usaha. Alasan para UMKM tidak menyusun

⁶⁴Marry Setiady, “Telaah Kesiapan dan Prospek.....

⁶⁵Evi Puji Lestari, “Kesiapan UMKM Dalam Implementasi....

laporan keuangan karena akuntansi dianggap rumit dan sulit untuk diterapkan serta keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode yang lebih sederhana yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan yaitu melalui penyusunan persamaan dasar akuntansi bagi UMKM.⁶⁶

C. Kerangka Berpikir



Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai Akuntansi Dasar sebagai awal dari pengukuran atas pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang diukur menggunakan kuesioner skala likert serta konfirmasi langsung melalui wawancara. Dari analisis atas pemahaman 2 (dua) indikator tersebut hasilnya akan mempengaruhi kesiapan

⁶⁶ Hetika dan Nurul Mahmudah, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Enititas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Menyusun Laporan Keuangan", *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. II No1, ISSN 2597-4157, (Juni 2018).

pelaku UMKM dalam implementasi SAK EMKM. Sehingga akhir dari penelitian ini dapat melihat prospek atas perbaikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan UMKM demi keberlangsungan usaha.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN


A. Gambaran Umum Objek

1. Profil Kota Bandar Lampung

a. Sejarah Singkat

1) Zaman Pra Kemerdekaan Indonesia

Wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah *Onder Afdeling* Telokbetong yang dibentuk berdasarkan *Staatsbalat* 1912 Nomor: 462 yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya.



Sebelum tahun 1912, Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telokbetong.

Ibukota *Onder Afdeling* Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* selaku Kepala *Onder Afdeling* Telokbetong.

Pada zaman pendudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan *Si* (Kota) dibawah pimpinan

seorang *Sicho* (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang *Fuku* *Sicho* (bangsa Indonesia).

2) Zaman Pasca Kemerdekaan Indonesia

Sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah

dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

3) Hari Jadi Kota Bandar Lampung

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, -terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: *“Lamong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang”* (Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.)-, dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.⁶⁷

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. “Publikasi Kota. 2018” (On-line), tersedia di : <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publikasi.html> (22 Juni 2019).

4) Pemimpin Bandar Lampung

Sampai saat ini, tercatat sudah 10 orang putra terbaik Lampung menjadi pemimpin di Kota Bandar Lampung, sebagaimana tabel berikut ini :⁶⁸

Tabel 3.1
Daftar Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

No	Nama Walikota dan Wakil Walikota	Tahun Menjabat
1.	Sumarsono	1956 – 1957
2.	H. Zainal Abidin Pagar Alam	1957 – 1963
3.	Alimudin Umar, S.H.	1963 – 1969
4.	Drs. H.M. Thabranie Daud	1969 – 1976
5.	Drs. H. Fauzi Saleh	1976 – 1981
6.	Drs. Zulkarnain Subing	1981 – 1986
7.	Drs. Nurdin Muhayat	1986 – 1995
8.	Drs. Suharto dan Achmad Yulizar	1995 – 2005
9.	Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd. dan Kherlani	2005 – 2010
10.	Drs. H. Herman HN, MM. dan Tobroni Harun	2010 – 2015
11.	Drs. H. Herman HN, MM. dan Yusuf Kohar	2016 – Sekarang

Sumber : Wikipedia, 25 Mei 2019.

b. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

Visi RPJMD Kota Bandar Lampung merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (desired future) dalam masa 5 (lima) tahun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung yang

⁶⁸ “Daftar Walikota Bandar Lampung” (On-line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_wali_kota_Bandar_Lampung (21 Juni 2019)

mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi kepala daerah Kota Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut (telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan daerah):

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN,
BERBUDAYA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING
BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN”**

Visi tersebut dapat dijabarkan dalam tafsir visi sebagai berikut:⁶⁹

- 1) **BANDAR LAMPUNG** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya.

Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

- 2) **SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. “Publikasi Kota. 2018” (On-line) tersedia di : <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publikasi.html> (22 Juni 2019).

disepakati masyarakat dan pemerintah.

3) CERDAS

: Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

4) BERIMAN

: Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

5) BERBUDIDAYA

: Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

6) UNGGUL

: Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh



bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

7) **BERDAYA SAING** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

8) **EKONOMI KERAKYATAN** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada

banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021, rumusan misi pembangunan daerah untuk mencapai Visi “BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN” dapat diformulasikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandar Lampung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungannya.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang produktif dan kompetitif.

- 3) Meningkatkan Daya Dukung infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka melayani kebutuhan distribusi perekonomian serta kebutuhan sosial masyarakat.
- 4) Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang religius, yang berketahanan keluarga dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri

serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang professionai dan sistem berbasis IPTEK menuju *Good Government Governance* dan pemerintahan yang bersih.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.⁷⁰

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam PPJMD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang

⁷⁰ RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021. *Publikasi Kota Bandar Lampung*. (Bandar Lampung: Bappeda Kota Bandar Lampung, 2016), h V-1.

memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

d. **Perkembangan Ekonomi dari Produk Domestik**

Pada Tahun 2014, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan Kota Bandar Lampung sebesar 35,31 triliyun rupiah. Pencapaian angka PDRB yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir menunjukkan keadaan perekonomian yang membaik.

2. UMKM di Kota Bandar Lampung

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di Kota Bandar Lampung banyak terdapat UMKM yang tersebar di seluruh kecamatannya, yaitu sebanyak 46.324 UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2018.

Sesuai dengan visi Kota Bandar Lampung menuju kota yang berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola

sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, adapun pada misi poin keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan, dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengembangan UMKM tentunya tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat, mengingat peran UMKM yang penting dan strategis sebagai pelaku ekonomi. Dari visi dan misi tersebut dapat dilihat dukungan dari pemerintah setempat dalam pengembangan UMKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan lapangan pekerjaan, dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang telah dijabarkan pada bab I bagian populasi dan sampel yang didapat melalui teknik *Incidental* atau berdasarkan kebetulan, berikut ini adalah data UMKM yang diteliti berdasarkan kriteria menurut Aset atau Modalnya:

Tabel 3.2
Data Usaha Mikro yang Diteliti

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat
1.	Toko Sinar Mas	Dagang	Kec. Tanjung Karang Pusat
2.	Nadya Salon & Spa	Jasa	Kec. Tanjung Karang Timur

3.	AC Service	Jasa	Kec. Tanjung Karang Timur
4.	Reno Duplikat Kunci	Jasa	Kec. Tanjung Karang Timur
5.	Viter Shop	Dagang	Kec. Tanjung Karang Timur
6.	Pie Kacang	Manufaktur	Kec. Tanjung Karang Barat
7.	Asep Sol Sepatu	Jasa	Kec. Tanjung Karang Barat
8.	Kedai Parwati	Manufaktur	Kec. Tanjung Karang Barat
9.	Bakso Malang Iyas	Manufaktur	Kec. Kedaton
10.	Bakso Tusuk AL	Manufaktur	Kec. Kedaton
11.	Firdha Cosmetics	Dagang	Kec. Rajabasa
12.	Toko Sepatu Sahara	Dagang	Kec. Rajabasa
13.	Mi Pangsit	Manufaktur	Kec. Tanjung Senang
14.	Dyshe Shop	Dagang	Kec. Tanjung Senang
15.	Toko Fitri	Dagang	Kec. Tanjung Senang
16.	Cahaya Laundry	Jasa	Kec. Tanjung Senang
17.	Foto Copy Putra Jaya	Dagang	Kec. Sukarame
18.	Toko Zakki	Dagang	Kec. Sukarame
19.	Donat Kentang	Manufaktur	Kec. Sukabumi
20.	Rumah Makan Selera	Manufaktur	Kec. Panjang
21.	Berkah Steam Motor	Jasa	Kec. Panjang
22.	Ikan Hias Arjuna	Dagang	Kec. Teluk Betung Selatan
23.	Nasi Uduk & Bubur Ayam Hj. Najwa	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Barat
24.	Warunk Mengan	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Barat
25.	Ngopi Ngumpet	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Barat
26.	Warung Makan Timbul Bangik	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Utara
27.	Soto Raos	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Utara
28.	Toko Tari	Dagang	Kec. Teluk Betung Utara
29.	Warung Nike	Dagang	Kec. Teluk Betung Timur
30.	Isi Ulang Galon “Tirta”	Dagang	Kec. Teluk Betung Timur
31.	Umi Collection	Dagang	Kec. Teluk Betung Timur
32.	Bakso Podomoro	Manufaktur	Kec. Bumi Waras
33.	Salon Sari	Jasa	Kec. Bumi Waras
34.	Mie Bakso Rel	Manufaktur	Kec. Enggal
35.	Martabak King	Manufaktur	Kec. Enggal
36.	Mie Ayam Goceng Pratama	Manufaktur	Kec. Enggal
37.	Utami Fashion	Dagang	Kec. Kedamaian
38.	Prqueen	Dagang	Kec. Kedamaian
39.	Toko Garuda	Dagang	Kec. Kedamaian
40.	Harum Laundry	Jasa	Kec. Way Halim
41.	Sanjaya Service	Jasa	Kec. Way Halim
42.	Toko Dita	Dagang	Kec. Kemiling
43.	Apotek Banu	Dagang	Kec. Kemiling
44.	Bakso Nagih	Manufaktur	Kec. Langkapura
45.	Melody Hijab	Dagang	Kec. Langkapura

46.	Pecel Lele Kharisma	Manufaktur	Kec. Langkapura
47.	NE project	Dagang	Kec. Langkapura
48.	Toko Sarah	Dagang	Kec. Labuan Ratu
49.	Denada Parfum	Dagang	Kec. Labuan Ratu

Tabel 3.3
Data Usaha Kecil yang Diteliti

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat
1.	Meubel Karya Indah	Manufaktur	Kec. Tanjung Karang Pusat
2.	Virgo Salon	Jasa	Kec. Tanjung Karang Pusat
3.	Sentosa Car Wash	Jasa	Kec. Tanjung Karang Pusat
4.	Jaya Cell	Dagang	Kec. Tanjung Karang Timur
5.	Global Komputer	Jasa	Kec. Tanjung Karang Barat
6.	Kitty Hijab	Dagang	Kec. Kedaton
7.	Rey Cell	Dagang	Kec. Kedaton
8.	Kefir Geh	Manufaktur	Kec. Rajabasa
9.	Mitra Cake	Manufaktur	Kec. Rajabasa
10.	Amanda Florist	Jasa	Kec. Rajabasa
11.	Yupiter Cell	Dagang	Kec. Tanjung Senang
12.	King	Manufaktur	Kec. Sukarame
13.	Acronics	Dagang	Kec. Sukarame
14.	Es Jeruk Peras	Manufaktur	Kec. Sukarame
15.	PK. Karya Jati	Manufaktur	Kec. Sukabumi
16.	Cahaya Motor	Dagang	Kec. Sukabumi
17.	Mickey Cell	Dagang	Kec. Panjang
18.	Bengkel Las TB	Manufaktur	Kec. Panjang
19.	Nagamas Cell	Dagang	Kec. Panjang
20.	Mie Lorong	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Selatan
21.	Bakso Eki	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Selatan
22.	Apotek Sehat	Dagang	Kec. Teluk Betung Selatan
23.	Neon Store	Dagang	Kec. Teluk Betung Barat
24.	Toko Bangunan Sejahtera	Dagang	Kec. Teluk Betung Barat
25.	Makanan Bu Rini	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Utara
26.	Nasi Uduk & Bubur Ayam Mang Uut	Manufaktur	Kec. Teluk Betung Utara
27.	Azizah Organizer	Jasa	Kec. Teluk Betung Timur
28.	Sinar Terang (Jual-Beli Karet)	Dagang	Kec. Teluk Betung Timur
29.	Penjahit Angkasa	Jasa	Kec. Bumi Waras
30.	TB. Persada	Dagang	Kec. Bumi Waras
31.	Bakso Solo	Manufaktur	Kec. Bumi Waras
32.	Bakso Pak De	Manufaktur	Kec. Enggal

33.	Sate Cak Umar	Manufaktur	Kec. Enggal
34.	Kerang Keki	Manufaktur	Kec. Kedamaian
35.	PK Mulya	Manufaktur	Kec. Kedamaian
36.	Lady Fame	Dagang	Kec. Way Halim
37.	Bamboo In Homestay	Jasa	Kec. Way Halim
38.	Ladiesoftlens	Dagang	Kec. Kemiling
39.	Asa Cell	Dagang	Kec. Kemiling
40.	Toko Panda	Dagang	Kec. Langkapura
41.	Bengkel	Jasa	Kec. Labuan Ratu
42.	Percetakan Pratama	Jasa	Kec. Labuan Ratu
43.	Adelia Bag's	Dagang	Kec. Labuan Ratu

Tabel 3.4
Data Usaha Menengah yang Diteliti

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat
1.	Karya Indah Interior Design	Manufaktur	Kec. Tanjung Karang Pusat
2.	CV. Maju Jaya Perkasa	Dagang	Kec. Tanjung Karang Barat
3.	Metrokom	Dagang	Kec. Kedaton
4.	Nusantara Diesel Parts	Dagang	Kec. Sukabumi
5.	Budi Wahana Motor	Dagang	Kec. Sukabumi
6.	CV. Jogja Jaya Mandiri	Dagang	Kec. Teluk Betung Selatan
7.	Thung Shing	Dagang	Kec. Way Halim
8.	Kobar	Manufaktur	Kec. Kemiling

Selain penyebaran keusioner peneliti juga melakukan wawancara dengan setiap pelaku usaha yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan untuk meyakinkan kembali jawaban yang responden berikan pada lembar kuesioner dengan panduan wawancara terlampir.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum tentang responden yang diteliti. Karakteristik responden dapat dilihat pada lembaran pertama kuisioner di bagian data responden yang meliputi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, jenis usaha, dan kriteria usaha. Data responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	51	51%
Perempuan	49	49%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah SPSS v.25, 2019.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang telah menjadi objek penelitian terdiri dari 51 orang atau 51% laki-laki dan 49 orang atau 49% adalah berjenis kelamin perempuan. Jadi, jumlah sampel terbanyak dalam penelitian ini adalah laki-laki.

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMP	25	25%
SMA	41	41%
Diploma	19	19%
S1	15	15%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah SPSS v.25, 2019.

Dari data karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah responden dengan latar belakang pendidikan terbanyak adalah pada lulusan SMA yaitu sebanyak 41 orang atau 41%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 15 orang atau 15%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha adalah pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan SMA.

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Presentase
Jasa	17	17%
Dagang	49	49%
Manufaktur	34	34%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah SPSS v.25, 2019.

Dari data distribusi responden berdasarkan jenis usaha pada tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa usaha dagang menjadi jenis usaha yang paling banyak tersebar jika dibandingkan dengan usaha jasa dan usaha yang bergerak dibidang manufaktur, yaitu sebanyak 49% dari 100 usaha yang telah diteliti.

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Kriteria Usaha

Kriteria Usaha	Frekuensi	Presentase
Mikro	49	49%
Kecil	43	43%
Menengah	8	8%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah SPSS v.25, 2019.

Tabel 4.4 menggambarkan distribusi responden berdasarkan kriteria usaha yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008, bahwa sebagian besar usaha yang ada adalah usaha yang tergolong kedalam kriteria usaha mikro yaitu sebanyak 49 usaha atau 49%, diikuti dengan usaha kecil sebanyak 43 atau 43%, kemudian usaha menengah paling sedikit dengan jumlah 8 atau 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung di dominasi oleh usaha mikro atau usaha dengan perkiraan omzet pertahun mencapai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah tersaji di bagian sebelumnya dan sesuai dengan data yang didapat dari dinas tersebut.

B. Analisis Uji Kualitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid dan reliabel karena kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Sehingga kuesioner layak atau tidak untuk digunakan dalam suatu penelitian. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r_{hitung} dari nilai jawaban setiap responden untuk setiap butir pernyataan kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} , dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan

N=100. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan, suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada dibawah 0,05.⁷¹ Hasil pengujian dan analisis validitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Ringkasan Hasil Uji Validitas Kuesioner

Item	Nilai R_{hitung}	Nilai R_{tabel}	Nilai sig.	Keputusan
PAD1	0,898	0,195	0,000	Valid
PAD2	0,812	0,195	0,000	Valid
PAD3	0,841	0,195	0,000	Valid
PAD4	0,847	0,195	0,000	Valid
PAD5	0,836	0,195	0,000	Valid
PAD6	0,886	0,195	0,000	Valid
PAD7	0,832	0,195	0,000	Valid
PAD8	0,861	0,195	0,000	Valid
PAD9	0,860	0,195	0,000	Valid
PAD10	0,872	0,195	0,000	Valid
PAD11	0,840	0,195	0,000	Valid
PAD12	0,769	0,195	0,000	Valid
PSAK1	0,794	0,195	0,000	Valid
PSAK2	0,857	0,195	0,000	Valid
PSAK3	0,843	0,195	0,000	Valid
PSAK4	0,819	0,195	0,000	Valid
PSAK5	0,889	0,195	0,000	Valid
PSAK6	0,768	0,195	0,000	Valid
PSAK7	0,686	0,195	0,000	Valid
PSAK8	0,762	0,195	0,000	Valid
KI1	0,735	0,195	0,000	Valid
KI2	0,657	0,195	0,000	Valid
KI3	0,812	0,195	0,000	Valid
KI4	0,668	0,195	0,000	Valid

⁷¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2009), h. 49.

KI5	0,837	0,195	0,000	Valid
KI6	0,860	0,195	0,000	Valid
KI7	0,845	0,195	0,000	Valid
KI8	0,830	0,195	0,000	Valid
KI9	0,802	0,195	0,000	Valid
KI10	0,763	0,195	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah SPSS v.25, 2019.

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 4.5, didapatkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid dengan nilai signifikansinya $<0,05$ dan dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{Tabel} yaitu 0,195, sehingga kuesioner untuk mengukur pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam implementasi SAK ETAP dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam hal ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan kriteria bahwa tingkat *alpha* dihitung lebih besar dari koefisien *Alpha Cronbach's* sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik.⁷²

⁷² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009), hlm.45

Adapun hasil pengujian dan analisis reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach Alpha yang disyaratkan</i>	Keterangan
Pemahaman Akuntansi Dasar	0,963	> 0,60	Reliabel
Pemahaman SAK EMKM	0,946	> 0,60	Reliabel
Kesiapan Implementasi SAK EMKM	0,929	> 0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS v.25, 2019.

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS v.25 didapat bahwa *Cronbach's Alpha* untuk Pemahaman Akuntansi Dasar yaitu sebesar 0,963, Pemahaman SAK ETAP sebesar 0,946 dan Kesiapan Implementasi SAK ETAP sebesar 0,929. Ketiganya lebih besar dari *Cronbach's Alpha* yang disyaratkan yaitu 0,60 dan semuanya dinyatakan reliabel sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa item-item tersebut memiliki kekonsistenan dalam pengukuran skor.

C. Deskripsi Jawaban Responden

Dalam penjabaran hasil proses pengolahan data atas jawaban responden pada kuesioner, pada bagian ini akan disampaikan hasil distribusi jawaban responden berdasarkan pembagiannya, yaitu: Pengetahuan Dasar-Dasar Akuntansi, Pengetahuan SAK-EMKM, dan Kesiapan Implementasi SAK-EMKM. Pada penelitian ini, untuk mengetahui berapa tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap akuntansi dan SAK EMKM,

dilakukan penyebaran kuesioner yang disusun dengan metode Likert dan untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut:

- a. Untuk pengukuran pemahaman dasar akuntansi dan SAK ETAP
 1. Sangat Paham (SP) diberi skor 5.
 2. Paham (P) diberi skor 4.
 3. Netral/Ragu (N) diberi skor 3.
 4. Tidak Paham (TP) diberi skor 2, dan
 5. Sangat Tidak Paham (STP) diberi skor 1.
- b. Untuk pengukuran kesiapan implementasi SAK EMKM
 1. Sangat Siap (SS) diberi skor 5.
 2. Siap (S) diberi skor 4.
 3. Netral/Ragu (N) diberi skor 3.
 4. Tidak Siap (TS) diberi skor 2, dan
 5. Sangat Tidak Siap (STS) diberi skor 1.

Pertanyaan untuk variabel Pemahaman pada kuesioner dibagi menjadi 2 indikator, yaitu indikator pemahaman terhadap Dasar Akuntansi dan indikator kedua yaitu pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). Sedangkan untuk variabel kesiapan pada kuesioner terdapat indikator persepsi dan fasilitas pendukung dalam penerapan SAK EMKM sebagai dasar laporan keuangan.

Dalam menganalisis data mengenai tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM terhadap SAK EMKM dalam penerapannya sebagai dasar laporan keuangan, dan untuk menginterpretasikan jawaban dari responden, peneliti

menentukan terlebih dahulu rata-rata dari total skor setiap variabel. Kemudian diklasifikasikan ke dalam bentuk kualitatif. Adapun pengklasifikasiannya digunakan pembagian dari Umi Narimawati sebagai berikut:

Tabel 4.7
Klasifikasi Pengelompokan Hasil Riset Berdasarkan Skala Likert

Presentase	Kriteria
20% - 36%	Tidak Siap/Tidak Paham
36,01% - 52%	Kurang Siap /Kurang Paham
52,01% - 68%	Cukup Siap /Cukup Paham
68,01% - 84%	Siap /Paham
84,01% - 100%	Sangat Siap / Sangat Paham

Sumber: Umi Narimawati, 2010.

Variabel Pemahaman dengan indikator pemahaman terhadap akuntansi dasar terdapat 12 pernyataan dalam kuesioner. Hasil dari perhitungan untuk setiap pernyataan yang telah peneliti olah dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pemahaman Akuntansi Dasar

Item Pernyataan	SP		P		N/R		TP		STP		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
PAD1	14	14%	55	55%	10	10%	21	21%	-	-	100	100%
PAD2	7	7%	45	45%	18	18%	29	29%	1	1%	100	100%
PAD3	15	15%	36	36%	17	17%	28	28%	4	4%	100	100%
PAD4	8	8%	27	27%	27	27%	34	34%	4	4%	100	100%
PAD5	29	29%	44	44%	10	10%	16	16%	1	1%	100	100%
PAD6	17	17%	53	53%	10	10%	14	14%	6	6%	100	100%
PAD7	27	27%	36	36%	11	11%	22	22%	4	4%	100	100%
PAD8	10	10%	47	47%	11	11%	26	26%	6	6%	100	100%
PAD9	9	9%	42	42%	17	17%	22	22%	10	10%	100	100%
PAD10	17	17%	40	40%	19	19%	20	20%	4	4%	100	100%
PAD11	25	25%	42	42%	16	16%	15	15%	2	2%	100	100%
PAD12	13	13%	36	36%	27	27%	19	19%	5	5%	100	100%

TOTAL	191%	503%	193%	266%	47%	100%
RATA-RATA	15,92%	41,92%	16,08%	22,17%	3,92%	

Sumber : Data Primer diolah SPSS v.25, 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab paham atas pernyataan-pernyataan terkait pemahaman dasar-dasar akuntansi yang ada dalam kuesioner yaitu sebesar 41,92%. Jawaban atas kuesioner tersebut diyakinkan dengan wawancara kepada pelaku UMKM, hasilnya dapat diketahui bahwa pemahaman ini didasarkan pada latar belakang pendidikan pelaku, semakin tinggi pendidikannya maka semakin paham terhadap akuntansi.

Kemudian untuk mengetahui berapa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) terdapat 8 pernyataan dalam kuesioner. Hasil dari perhitungan untuk setiap pertanyaan yang telah peneliti olah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pemahaman SAK-EMKM

Item	SP		P		N/R		TP		STP		Total	
Pernyataan	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
PSAK1	8	8%	12	12%	12	12%	56	56%	12	12%	100	100%
PSAK2	2	2%	8	8%	12	12%	51	51%	27	27%	100	100%
PSAK3	1	1%	12	12%	5	5%	43	43%	39	39%	100	100%
PSAK4	5	5%	17	17%	11	11%	53	53%	14	14%	100	100%
PSAK5	2	2%	4	4%	8	8%	33	33%	53	53%	100	100%
PSAK6	2	2%	9	9%	19	19%	40	40%	30	30%	100	100%
PSAK7	2	2%	5	5%	17	17%	49	49%	27	27%	100	100%
PSAK8	3	3%	18	18%	17	17%	34	34%	28	28%	100	100%
TOTAL	25%		85%		101%		359%		230%		100%	
RATA-RATA	3,125%		10,625%		12,625%		44,875%		28,75%			

Sumber : Data Primer diolah SPSS v.25, 2019.

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa sangat sedikit pelaku UMKM yang memahami standar keuangan berlaku saat ini yaitu SAK EMKM. Sebanyak 44,875% merupakan pelaku UMKM yang tidak paham bahkan 28,75% lainnya mengaku sangat tidak paham atau sama sekali tidak mengetahui adanya standar keuangan ini.

Untuk mengetahui berapa tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dari segi persepsi dan fasilitas pendukung terdapat 8 pernyataan dalam kuesioner, hasil dari perhitungan untuk setiap pernyataan yang telah peneliti olah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesiapan Implementasi SAK-EMKM

Item	SS		S		N/R		TS		STS		Total	
Pernyataan	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
KI1	15	15%	51	51%	13	13%	21	21%	-	-	100	100%
KI2	18	18%	50	50%	20	20%	11	11%	1	1%	100	100%
KI3	17	17%	40	40%	10	10%	19	19%	14	14%	100	100%
KI4	23	23%	48	48%	15	15%	14	14%	-	-	100	100%
KI5	18	18%	37	37%	5	5%	29	29%	11	11%	100	100%
KI6	8	8%	21	21%	4	4%	48	48%	19	19%	100	100%
KI7	5	5%	12	12%	14	14%	34	34%	35	35%	100	100%
KI8	7	7%	16	16%	12	12%	30	30%	35	35%	100	100%
KI9	10	10%	30	30%	20	20%	32	32%	8	8%	100	100%
KI10	7	7%	33	33%	31	31%	27	27%	2	2%	100	100%
TOTAL	128%		338%		144%		265%		110%		100%	
RATA-RATA	12,8%		33,8%		14,4%		26,5%		11%			

Sumber : Data Primer diolah SPSS v.25, 2019.

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa belum semua pelaku UMKM siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM dalam pencatatan laporan keuangannya.

Namun cukup banyak UMKM yang siap dari segi persepsi dan fasilitas penunjang untuk mengimplementasikan SAK EMKM yaitu sebesar 33,8%, disisilain sebanyak 26,6% pelaku UMKM mengaku tidak siap.

Berikut adalah klasifikasi hasil riset dari keseluruhan variabel yang dapat menggambarkan hasil akhir dari penelitian ini:

Tabel 4.11
Klasifikasi Hasil Riset

Variabel	Total skor Rata-rata (100 responden)	Presentase (rata-rata skor/maksimum total skor) x 100%	Klasifikasi Hasil
Pemahaman Akuntansi Dasar	41,25	68,75 %	Paham
Pemahaman SAK-EMKM	16,72	41,80 %	Kurang Paham
Kesiapan Implementasi SAK-EMKM	30,76	61,52%	Cukup Siap

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Dari Tabel 4.11 di atas maka dapat ditarik kesimpulan dengan menyesuaikan pada klasifikasi pengelompokkan hasil riset berdasarkan skala likert pada tabel 4.7 sebelumnya, bahwa tingkat Pemahaman Akuntansi Dasar para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 68,75% yaitu terkategori paham. Namun, berbeda hasilnya dengan Pemahaman terhadap SAK EMKM yang hanya mencapai 41,80% atau terkategori kurang paham. Kesiapan untuk pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung terhadap implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan diukur dari segi persepsi dan fasilitas pendukung adalah sebesar 61,52% atau dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung cukup siap untuk mengimplementasikan SAK

EMKM.

Dari klasifikasi hasil riset diatas peneliti uraikan lebih rinci lagi seperti pada kedua tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Rincian Klasifikasi Hasil Riset Berdasarkan Kriteria Usaha

Variabel	Kriteria Usaha	Total Skor Rata-rata	Presentase	Klasifikasi
Pemahaman Akuntansi Dasar	Mikro	36,04	60,07 %	Cukup Paham
	Kecil	45,23	75,39 %	Paham
	Menengah	51,75	86,25 %	Sangat Paham
Pemahaman SAK-EMKM	Mikro	14,71	36,79 %	Kurang Paham
	Kecil	18,33	45,81 %	Kurang Paham
	Menengah	20,38	50,94 %	Kurang Paham
Kesiapan Implementasi SAK-EMKM	Mikro	25,98	51,96 %	Kurang Siap
	Kecil	34,12	68,23 %	Siap
	Menengah	42	84 %	Siap

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria Usahanya, pelaku yang paling paham baik itu akuntansi dasar maupun pemahaman terkait SAK EMKM yaitu pelaku usaha menengah. Dibandingkan dengan pelaku usaha mikro dan kecil, pelaku usaha menengah juga lebih siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangannya jika dilihat dari segi persepsi dan fasilitas penunjang.

Tabel 4.13
Rincian Klasifikasi Hasil Riset Berdasarkan Jenis Usaha

Variabel	Jenis Usaha	Total Skor Rata-rata	Presentase	Klasifikasi
Pemahaman Akuntansi Dasar	Jasa	38	63,33 %	Cukup Paham
	Dagang	43,35	72,24 %	Paham
	Manufaktur	39,68	66,13 %	Cukup Paham

Pemahaman SAK-EMKM	Jasa	14,06	35,14 %	Tidak Paham
	Dagang	18,84	47,09 %	Kurang Paham
	Manufaktur	14,91	37,28 %	Kurang Paham
Kesiapan Implementasi SAK-EMKM	Jasa	27,72	55,44 %	Cukup Siap
	Dagang	33,16	66,33 %	Cukup Siap
	Manufaktur	28,71	57,41 %	Cukup Siap

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa pelaku usaha yang bergerak pada sektor perdagangan telah paham terhadap akuntansi dasar dibanding dengan pelaku usaha jasa dan manufaktur, tingkat pemahamannya yaitu sebesar 72,24% atau terkategori paham. Namun berbeda dengan pemahaman terhadap SAK EMKM, dari ketiga jenis usaha yang diteliti tidak ada yang memiliki pemahaman yang cukup bahkan salah satu jenis usaha yaitu jasa tidak paham dengan adanya standar tersebut. Jenis usaha dagang yang memiliki pemahaman tertinggi diantara dua usaha yang lainnya hanya mencapai tingkat pemahaman sebesar 47,09% dan masih terkategori kurang paham. Meskipun tingkat kesiapannya hanya sebesar 66,33 % dan terkategori cukup siap, jenis usaha dagang juga menjadi sektor yang paling tinggi tingkat kesiapannya untuk mengimplementasikan SAK EMKM dari dua jenis usaha lainnya.

D. Pembahasan

1. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung Mengenai SAK EMKM

SAK EMKM baru mulai diperkenalkan pada awal tahun 2018, kurangnya pemahaman terhadap SAK EMKM dapat disebabkan karena belum adanya upaya dari pemerintah setempat atau pihak-pihak terkait

untuk mensosialisasikan SAK EMKM sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum paham terhadap perlakuan akuntansinya, bahkan tidak sedikit pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang adanya pemberlakuan SAK EMKM tersebut, padahal seharusnya SAK EMKM dapat menjadi sarana yang memberikan kemudahan dalam berbagai hal untuk menjalankan usaha, salah satunya adalah untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan.

Sebagian besar pelaku usaha belum memahami standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini memungkinkan terjadi karena pendidikan seseorang menyebabkan kemudahan daya tangkap atas suatu hal baru yang diterima. Pelaku usaha dengan jenjang pendidikan lebih tinggi lebih mudah memahami hal baru dibanding pelaku usaha dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaku UMKM tentang pemahaman SAK EMKM menunjukkan hasil yang bervariasi. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung juga sangat bervariasi. Jika dilihat berdasarkan kriteria usahanya, pelaku usaha menengah mempunyai pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil. Selain pemahaman dan kemampuan SDM yang mumpuni, usaha menengah juga memiliki fasilitas yang lebih baik untuk mendukung penyusunan laporan keuangan usahanya sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas. Hal ini juga terjadi karena usaha menengah

mempunyai pola pertanggungjawaban yang berbeda dengan usaha mikro dan kecil yang cenderung dimiliki dan dikelola oleh satu pihak yang sama, sedangkan usaha menengah memiliki pola pertanggungjawaban yang lebih luas kepada beberapa pihak yang menjadi *stakeholder* (pemilik, pihak ke tiga seperti kreditur, pemasok, dan lain-lain) yang dipenuhi dan diungkapkan melalui laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja pihak pengelola.

2. Kesiapan Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung dalam Implementasi SAK EMKM

Melihat kondisi lapangan setelah observasi dan penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa UMKM di Kota Bandar Lampung telah cukup siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan. Hasil wawancara menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM dipengaruhi oleh besarnya omzet yang diterima, semakin kecil omzet perusahaan maka semakin rendah tingkat kesiapan pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM, ini dikarenakan masih adanya persepsi bahwa pembuatan laporan keuangan adalah suatu hal yang rumit dan tidak ada pengaruhnya bagi usaha mereka.

Pelaku UMKM merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya, kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usaha. Pencatatan dilakukan hanya dengan menghitung selisih antara

uang masuk dan uang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk atau dari alokasi kegiatan usaha ataupun non usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil menengah hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau kegiatan yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut.

Pemisahan antara keuangan usaha dan milik pribadi belum dilakukan oleh sebagian besar pelaku usaha Mikro dan Kecil yang dikelola pemiliknya sendiri, hanya usaha Menengah yang sudah melakukan pemisahan keuangan karena banyak pihak yang ikut serta mengelola usahanya. Kesadaran akan pentingnya mengimplementasikan SAK EMKM juga dirasakan oleh pelaku usaha Menengah dan beberapa usaha Kecil yang operasionalnya sudah berjalan lancar, selain fasilitas pendukung yang dimiliki mereka mengaku memerlukan jasa atau orang yang mumpuni dalam bidang akuntansi untuk dapat membantu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar berlaku yaitu SAK EMKM.

Sosialisasi dari pihak yang berkepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman, lebih baik lagi jika diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sehingga implementasi SAK EMKM akan mempunyai peluang untuk diimplementasikan. Dengan demikian, pelaporan keuangan dan pembukuan akuntansi merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam perkembangan usaha khususnya UMKM, sehingga jika mereka telah memahami SAK EMKM maka mereka akan mengimplementasikan SAK EMKM karena mereka menyadari pentingnya melakukan pelaporan keuangan dengan berdasarkan standar yang berlaku.

3. Kesesuaian SAK EMKM dengan Konsep Pencatatan Keuangan dalam Perspektif Islam

Standar adalah suatu patokan yang bertujuan memberikan batasan-batasan yang sesuai untuk diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan seperti halnya standar pencatatan keuangan yang harus dicatat sebaik mungkin dan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Dari hal tersebut memicu munculnya standar akuntansi keuangan yang berlaku sesuai kebutuhan setiap entitas yaitu salah satunya adalah SAK EMKM yang menyebabkan praktik akuntansi dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan menjadikannya sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang memuat aturan dari mulai bentuk serta isi laporan keuangan itu sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II.

Standar akuntansi yang ada dapat berubah dikarenakan adanya perkembangan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi pada perekonomian. Berbeda dengan aturan pada Alqur-an yang tidak akan pernah berubah, akuntansi dalam islam lebih merujuk serta mengarah pada proses, hasil-hasil informasi keuangan yang tentunya sesuai dengan tuntunan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alqur-an dan Hadits

yang menjadi pedoman bagi umat dalam mengerjakan segala bentuk laporan keuangan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dilihat dari pola pencatatannya, akuntansi keuangan memang tidak disebutkan secara langsung dan terperinci tetapi konsep-konsep di dalam akuntansi tetap ada dalam Alquran dengan pemaparan yang luas dan butuh penjelasan yang lebih detail. Beberapa konsep akuntansi yang terkandung dalam Q.S Albaqarah ayat 282 diantaranya:

1. Identifikasi Transaksi. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang beriman yang melakukan kegiatan muamalah, dalam hal ini yaitu dalam konteks utang/piutang. Ini menunjukkan konsep identifikasi dalam proses akuntansi yaitu mengidentifikasi suatu transaksi dan mengkategorikannya ke dalam asset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Identifikasi ini akan mempermudah ingatan manusia ketika melakukan transaksi.
2. Mencatat Transaksi. Salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi. Pencatatan ini dimaksudkan dalam Alqur-an sebagai bukti yang akan menjadi keterangan transaksi, sebagaimana definisi akuntansi yaitu penyediaan informasi.
3. Periodeisasi atau Waktu Akuntansi. Ayat tersebut juga menjelaskan waktu dalam bermuamalah, dalam akuntansi juga terdapat konsep waktu yaitu untuk semua transaksi harus jelas

tanggalnya dan ada periode pelaporan keuangan yang terus-menerus atau *continue*.

4. Karakteristik Akuntansi. Karakteristik pokok akuntansi seperti yang ada dalam aturan standar akuntansi keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Ayat tersebut juga menjelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami oleh orang yang berhutang (debitur), jika tidak dapat memahami dianjurkan untuk menunjuk orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang memadai terhadap keuangan. Selain itu dalam mencatat transaksi haruslah dengan benar agar laporan yang dihasilkan relevan, dan tidak ada konsep yang tidak material dalam transaksi utang-piutang. Baik kecil maupun besar haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai akad diawal.

5. Saksi. Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang harus valid, dimana setiap bukti transaksi haruslah jelas siapa *maker*, *checker*, *approval*, dan lain-lain.

Analogi terkait saksi diatas didasarkan pada sebuah Hadits yang memperbolehkan Ijtihad. Hadits tersebut menceritakan pada saat Rasulullah membenarkan sahabat Mu'adz bin Jabal yang akan memutuskan hukum berdasar ra'yu, ketika tak ada tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu sebagai berikut :

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ:

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ
 قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Dari orang-orang Himsh murid dari Mu'adz bahwa Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: "Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?" Muaz menjawab: "Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah" Nabi bertanya lagi: "Sekiranya kamu tidak mendapati didalam kitab Allah?" Jawab Muaz: "Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah." Tanya Nabi lagi: "Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?" Muaz menjawab, ' Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah." ⁷³

Hadits di atas jelas menunjukkan bahwa manusia mendapat wewenang membuat peraturan, hukum, dan keputusan peradilan. Maka, tidak tepat pendapat sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa hanya Allah yang boleh membuat peraturan. Ketika tidak ada keterangan Al-Quran dan Sunnah tentang suatu masalah, seorang hakim boleh mengambil keputusan

⁷³ HR. Al-Baihaqi No. 3250

berdasarkan ijtihadnya. Pemikiran yang mempertimbangkan Al-Quran dan Sunnah.

Dari beberapa konsep akuntansi yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang dipaparkan diatas, konsep-konsep tersebut juga telah diterapkan dalam aturan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Meskipun standar akuntansi keuangan berbasis syariah yang banyak mengadopsi nilai-nilai ekonomi islam sesuai syariat juga telah ada yaitu PSAK Syariah, namun tidak semua entitas dapat menerapkannya. Sasaran untuk diterapkannya setiap standar akuntansi juga akan berbeda sesuai dengan karakteristik entitas. Bagi entitas yang tergolong Mikro, Kecil, dan Menengah telah diterbitkan standar yang bernama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun, para pelaku UMKM masih merasa kesulitan dalam menerapkan standar tersebut dan itu menjadi alasan diterbitkannya SAK EMKM sebagai alternatif untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini serta berdasarkan data dan informasi yang telah didapat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung telah paham terhadap akuntansi dari segi pemahaman terhadap dasar-dasar akuntansi. Namun, dari hasil yang didapatkan melalui kuesioner dan wawancara, pelaku UMKM hanya mengetahui akuntansi sebatas dasar-dasarnya saja, sedangkan untuk pengetahuan tentang Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pelaku UMKM kurang memahami perlakuan akuntansi yang berdasarkan pada SAK EMKM. Ini dikarenakan SAK EMKM itu sendiri masih baru diberlakukan dan sosialisasinya belum menyeluruh.
2. Untuk kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM sebagai dasar laporan keuangan dalam hal ini ditinjau dari indikator persepsi dan fasilitas pendukung, dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung cukup siap untuk membuat laporan keuangan yang berdasarkan pada SAK EMKM. Dapat juga ditarik kesimpulan dari kuesioner dan wawancara dalam penelitian ini bahwa persepsi pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM juga dipengaruhi oleh besarnya

omzet yang diterima, semakin kecil omzet perusahaan maka semakin rendah tingkat kesiapan pelaku UMKM untuk menerapkan SAK UMKM, ini dikarenakan masih adanya persepsi bahwa catatan keuangan adalah suatu hal yang rumit dan tidak ada pengaruhnya bagi usaha mereka.

3. Dalam islam, keharusan melakukan pencatatan atas transaksi keuangan dijelaskan dalam Alquran salah satunya ada pada surat Albaqarah ayat 282. Konsep-konsep yang terkandung didalamnya sudah ada pada SAK EMKM, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa SAK EMKM memiliki kesesuaian dengan konsep atau pola pencatatan keuangan yang ada dalam Alquran.

B. Rekomendasi

Rekomendasi atau saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI), pemerintah setempat, dan pihak lainnya yang terkait sebaiknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi terkait dengan kebutuhan dan pentingnya pembukuan yang memakai standar akuntansi. DSAK-IAI juga sebaiknya memberikan pengarahan dan penjelasan tentang hubungan akuntansi terhadap peningkatan usaha. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak dari pelaku usaha UMKM yang belum memahami mengenai SAK-EMKM.
2. Bagi pelaku UMKM sebaiknya mulai menerapkan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi untuk menunjang usahanya

dan dalam hal ini DSAK-IAI telah mengesahkan SAK EMKM yang lebih sederhana untuk digunakan dan dipahami oleh pelaku UMKM.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas ruang lingkup penelitian baik dari segi variabel maupun dari segi wilayah sehingga dapat menggambarkan hasil yang lebih representatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemah. *Al-Aliyy*. 2006. Bandung: CV. Diponerogo.
- Ali Mauludi. 2014. *Tekhnik Memeahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Ali Mauludi. 2014. *AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif*. Iqtishadia, Vol. I No. 1
- Arri Alfritri, Ngadiman, Sohidin. 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten*. Jurnal penelitian UNS. Vol. II No. 2.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. "Publikasi Kota. 2018" (On-line), tersedia di : <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publikasi.html> (22 Juni 2019).
- Bank Indonesia. "Kajian Ekonomi Regional" (On-line), tersedia di : <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/lampung/pages/KEKR-Provinsi-Lampung-Periode-Mei-2019.aspx> (24 Juni 2019).
- Cahyati, Ari Dewi. Et al. 2011. *Pemahaman dan Kesiapan UKM dalam Implementasi SAK ETAP: Survey pada UKM di Bekasi*. UNISMA Bekasi, JRAK. Vol. II No. 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwijayanti, S Patricia Febrina. Tuti, Rias. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP*. ISSN NO : 1978 – 6522.
- Ernawati, Sri. Asyikin, Jumirin. Sari, Octavia. 2016. *Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di kota Banjarmasin*. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA. Vol. VI No. 2.
- Hetika dan Nurul Mahmudah. 2018. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Enititas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Menyusun Laporan Keuangan*. Jurnal Bisnis Terapan. Vol. II No. 1. ISSN 2597-4157.
- Ibrahiem Moussa. 2017. *Pencatatan Keuangan Menurut Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Surabaya*. Artikel Ilmiah.

Ikatan Akuntan Indonesia. “Standar Akuntansi Keuangan”. (On-line), tersedia di: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/emkm> (6 februari 2019).

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: IAI.

Kamus Besar Bahasa Indonesia – “Arti kata implementasi” (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/implementasi> (18 Mei 2019).

Kurniawanyasah, Deddy. 2016. *Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Universitas Airlangga Surabaya*. Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal.

Kusuma, I.C, V. Lutfiany. 2018. *Persepsi UMKM dalam Memahami SAK EMKM*. Jurnal AKUNIDA. Vol. 4 No. 2.

Lestari, Evi Puji. 2018. *Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno*. Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1.

M. Qurais Shihab. 2007. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Narsa, I Made. Agus Widodo & Sigit Kurnianto. 2012. *Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan*. Majalah Ekonomi XXII. Vol III.

Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Pusat Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahmawati, Teti. dan Puspasari, Oktaviani Rita. *Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan*. Universitas Kuningan. Jurnal Kajian Akuntansi. Vol. I No. 1.

Riahi-Belkaoui, A. 2006. *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.

Riduwan. 2013. *Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Rudiantoro, Rizki. dan Siregar, Sylvia Veronica. 2012. *Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. XI No. 1.
- Sariningtyas, Pratiwi. dan Diah W, Tituk. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil Dan Menengah*. JAKI. Vol. I No. 1.
- Setiady, Marry. 2011. *Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha Umkm Garmen Di Pusat Grosir Surabaya*.
- Sitorus, Dewi Novita. 2016. *Analisis Determinan Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM mengenai SAK ETAP serta Pengaruhnya terhadap Kemudahan Akses ke Lembaga Keuangan*. Jurnal Akuntansi. Vol. VIII No. 1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Afabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanto, Barkah. dan Yuliani, Nur Laila. 2012. *Prospek Implementasi SAK ETAP Berbasis Kualitas Laporan Keuangan UMKM*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Wahid, Nisa Noor. 2017. *Pengaruh Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Dan Motivasi Terhadap Kinerja UKM di Kota Tasikmalaya*. Jurnal Akuntansi. Vol. XII No. 1.
- Wikipedia. "Daftar Walikota Bandar Lampung". (On-line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_wali_kota_Bandar_Lampung (21 Juni 2019).
- Wikipedia. "Usaha Kecil Menengah". (On-line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/Usaha_Kecil_dan_Menengah (6 februari 2019).
- Yayuk Sulistyowati. 2017. *Pencatatan Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di Kota Malang*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. V No. 2.